



MANAJEMEN PENDIDIKAN DI WILAYAH PERBATASAN NKRI-RDTL: MANAJEMEN KEUANGAN DALAM PEMENUHAN SARANA PRASARANA

**Frengky Neolaka^{1*}, Fitra Ramadhan², Fincensius Oetpah³,
& Erlin Fatima Halek⁴**

^{1,2,3,&4}Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Timor, Sasi, Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur 85616, Indonesia

*Email: frengkyneolaka@gmail.com

Submit: 10-03-2026; Revised: 14-03-2026; Accepted: 15-03-2026; Published: 15-04-2026

ABSTRAK: Manajemen keuangan sekolah merupakan faktor penting dalam mendukung pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di wilayah perbatasan yang menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen keuangan dalam pemenuhan sarana dan prasarana sekolah di wilayah perbatasan NKRI-RDTL. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *multiple case study* pada empat sekolah, yaitu SMP Negeri Kota Baru, SMPK St. Antonius Padua Sasi, SMA Negeri Noemuti, dan SMP Negeri Fatumfaun. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen keuangan sekolah memiliki perbedaan pada setiap sekolah, terutama dalam aspek perencanaan anggaran dan pengelolaan sumber pendanaan. SMA Negeri Noemuti memiliki pengelolaan keuangan terbaik dengan skor 96%, sedangkan SMP Negeri Kota Baru memperoleh skor terendah sebesar 62%. Dalam hal sarana dan prasarana, SMP Negeri Fatumfaun memperoleh skor tertinggi sebesar 92%. Meskipun fasilitas dasar pembelajaran relatif tersedia, beberapa fasilitas pendukung masih terbatas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang terencana dan transparan berperan penting dalam mendukung pemenuhan sarana prasarana pendidikan di wilayah perbatasan.

Kata Kunci: Keuangan, Manajemen Pendidikan, Perbatasan NKRI-RDTL, Sarana Prasarana.

ABSTRACT: School financial management is a crucial factor in supporting the provision of educational facilities and infrastructure, particularly in border areas facing various resource constraints. This study aims to analyze the application of financial management in providing school facilities and infrastructure in the border area of the Republic of Indonesia (NKRI) and the Republic of Timor-Leste (RDTL). The study employed a qualitative approach with a multiple case study design in four schools: Kota Baru Public Junior High School, St. Antonius Padua Sasi Junior High School, Noemuti Public Senior High School, and Fatumfaun Public Junior High School. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results show that the implementation of school financial management varies across schools, particularly in aspects of budget planning and funding source management. Noemuti Public Senior High School had the best financial management with a score of 96%, while Kota Baru Public Junior High School received the lowest score of 62%. In terms of facilities and infrastructure, Fatumfaun Public Junior High School received the highest score of 92%. Although basic learning facilities are relatively available, some supporting facilities are still limited. The findings of the study indicate that planned and transparent financial management plays a crucial role in supporting the provision of educational facilities and infrastructure in border areas.

Keywords: Finance, Management of Education, NKRI-RDTL Border, Infrastructure.

How to Cite: Neolaka, F., Ramadhan, F., Oetpah, F., & Halek, E. F. (2026). Manajemen Pendidikan di Wilayah Perbatasan NKRI-RDTL : Manajemen Keuangan dalam Pemenuhan Sarana Prasarana. *Panthera : Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains dan Terapan*, 6(2), 942-951. <https://doi.org/10.36312/panthera.v6i2.1159>

Uniform Resource Locator: <https://e-journal.lp3kamandanu.com/index.php/panthera>



PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan mampu bersaing secara global. Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum yang relevan dan proses pembelajaran yang efektif, tetapi juga oleh manajemen pendidikan yang dikelola secara profesional dan akuntabel. Manajemen pendidikan adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Jannah, 2025). Oleh karena itu, manajemen pendidikan yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama di wilayah perbatasan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya dan tantangan pengelolaan lembaga pendidikan.

Salah satu aspek penting dalam manajemen pendidikan adalah manajemen keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan memungkinkan sekolah mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional dan pengembangan sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah memiliki peran penting dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui proses perencanaan anggaran, penggunaan dana, serta pengawasan keuangan yang efektif (Pusvitasari & Sukur, 2020). Namun, beberapa temuan menunjukkan bahwa manajemen pendidikan di berbagai wilayah perbatasan menghadapi tantangan yang kompleks. Layanan pendidikan di daerah terpencil masih kurang memadai dan banyak permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, seperti minimnya akses pendidikan, sarana dan prasarana, dan kurangnya guru yang profesional (Tyas *et al.*, 2024).

Daerah perbatasan seringkali menghadapi keterbatasan tenaga pengajar, infrastruktur, dan fasilitas pendidikan yang menimbulkan ketimpangan kualitas pendidikan dibandingkan dengan daerah perkotaan (Hasanah, 2021). GYM & Muadin (2025) melaporkan bahwa di daerah terpencil menghadapi berbagai permasalahan yang signifikan, di antaranya kekurangan guru berkualitas, kemiskinan, dan rendahnya latar belakang pendidikan orang tua. Berbagai permasalahan di beberapa sekolah yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Nusa Cendana (YAPNUSDA) yang didirikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain dana BOS yang tidak cair, kekurangan dana operasional, dan evaluasi bulanan manajemen keuangan sekolah yang belum dilaksanakan, minimnya literasi keuangan, karena guru yang ditunjuk dan bertugas menjadi bendahara tidak memiliki latar belakang keuangan/akuntansi (Aryanindita, 2026).

Berbagai permasalahan pengelolaan keuangan tersebut sangat mempengaruhi efektivitas pemanfaatan sumber daya keuangan dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan pengembangan sekolah. Kemampuan mengelola keuangan yang efektif akan berpengaruh terhadap sarana dan prasarana (Masbullah, 2023). Penguatan manajemen keuangan dengan perencanaan yang lebih cermat serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana akan mendukung



proses pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (Andriani *et al.*, 2025).

Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk wilayah perbatasan di Indonesia dikelompokkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) ini menjadi tantangan, karena banyak persoalan yang dihadapi. Wilayah ini dinilai memerlukan bantuan dari pemerintah dalam pendidikan, termasuk sarana prasarana, tenaga pendidik, akses pendidikan yang merata, dan manajemen pendidikan yang efektif (Kennedy, 2022; Nenotek *et al.*, 2023). Ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah perbatasan NKRI-RDTL bersifat kondisional dan memengaruhi terciptanya *minimum condition for good learning*. Oleh karena itu, kreativitas pengelola pendidikan dan guru dalam memaksimalkan potensi yang terbatas menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah perbatasan (Wulakada, 2024).

Berbagai penelitian telah membahas pentingnya manajemen keuangan dalam pemenuhan sarana dan prasarana. Pusvitasari & Sukur (2020) melaporkan bahwa pentingnya pengelolaan keuangan dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan melalui pelibatan *stakeholders*. Sukma & Nasution (2022) menyatakan bahwa manajemen keuangan sekolah dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan dilakukan melalui perencanaan anggaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Kholidah *et al.* (2023) menyatakan bahwa manajemen keuangan memiliki peran strategis dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, terutama melalui perencanaan anggaran dan pengelolaan dana sekolah yang efektif.

Sebagian besar studi masih berfokus pada konteks wilayah perkotaan atau daerah yang memiliki akses sumber daya pendidikan yang relatif memadai. Sedangkan kajian yang secara khusus menelaah praktik manajemen pendidikan di wilayah perbatasan NKRI-RDTL memiliki karakteristik yang berbeda, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta akses terhadap layanan pendidikan yang masih terbatas. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan lembaga pendidikan yang lebih adaptif dan kontekstual agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan penelitian untuk menganalisis penerapan manajemen keuangan dalam pemenuhan sarana dan prasarana sekolah di wilayah perbatasan NKRI-RDTL. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai strategi pengelolaan lembaga pendidikan yang efektif dalam menghadapi berbagai tantangan di wilayah perbatasan, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik manajemen pendidikan yang lebih kontekstual di daerah perbatasan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *multiple case study*. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik manajemen keuangan sekolah dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan pada sekolah-sekolah yang berada di wilayah perbatasan NKRI-RDTL. Desain *multiple case study* digunakan karena penelitian melibatkan 4 sekolah, yaitu SMPN Kota Baru, SMPK St. Antonius



Padua Sasi, SMA Negeri Noemuti, dan SMPN Fatumfaun, sehingga memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi dan perbandingan antar kasus untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif (Creswell & Poth, 2018). Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan bahwa sekolah-sekolah tersebut berada di kawasan perbatasan dan menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, khususnya dalam pengelolaan keuangan sekolah dan pemenuhan sarana prasarana.

Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah dan guru yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan sarana prasarana. *Informan* penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan *informan* secara sengaja dengan pertimbangan kriteria yaitu memiliki peran atau tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan sekolah atau sarana prasarana, memahami proses perencanaan, dan penggunaan anggaran sekolah. Jumlah *informan* dalam penelitian ini sebanyak 4 orang, yang terdiri dari 3 kepala sekolah dan 1 guru.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada kepala sekolah dan guru untuk memperoleh informasi terkait proses perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan anggaran sekolah, serta pemenuhan sarana prasarana pendidikan. Wawancara dilakukan secara *semi-terstruktur* menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Prosedur wawancara dimulai dengan menentukan jadwal wawancara dengan *informan*, menjelaskan tujuan penelitian, meminta persetujuan *informan*, kemudian melakukan wawancara secara langsung.

Observasi langsung dilakukan terhadap kondisi sarana prasarana serta praktik pengelolaan administrasi dan keuangan di sekolah. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data penelitian melalui penelusuran berbagai dokumen sekolah, seperti Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta dokumen administrasi sarana prasarana. Dokumen-dokumen tersebut dianalisis untuk mendukung data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Creswell & Poth, 2018). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen keuangan sekolah di wilayah perbatasan NKRI-RDTL memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada setiap sekolah. Perbedaan tersebut terutama terlihat pada aspek perencanaan anggaran, sumber pendanaan, serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan sekolah. Meskipun seluruh sekolah mengacu pada regulasi pengelolaan keuangan pendidikan, implementasinya menunjukkan variasi yang dipengaruhi



oleh kapasitas manajemen sekolah, dukungan sumber daya, serta kondisi lingkungan sekolah di wilayah perbatasan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa SMA Negeri Noemuti memiliki praktik manajemen keuangan yang paling sistematis dan transparan, hal ini dilihat dari skor yang diperoleh yaitu 96% (kategori sangat baik) dibandingkan dengan sekolah lainnya. Hal ini terlihat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi bahwa proses perencanaan anggaran yang melibatkan berbagai unsur sekolah serta adanya mekanisme pelaporan yang relatif tertib. Salah satu *informan* menyampaikan bahwa proses perencanaan keuangan dilakukan secara partisipatif melalui rapat sekolah yang melibatkan guru dan tenaga kependidikan.

“Setiap penyusunan RKAS kami lakukan melalui rapat bersama guru dan staf, sehingga semua kegiatan sekolah dapat direncanakan sesuai kebutuhan pembelajaran” (Informan Kepala Sekolah).

Sedangkan pada sekolah lain seperti SMP Negeri Fatumfaun dan SMPK St. Antonius Padua Sasi, pengelolaan keuangan sekolah juga berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam aspek perencanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan. Hal ini terutama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan pengalaman dalam pengelolaan administrasi sekolah. Kondisi yang relatif berbeda terlihat pada SMP Negeri Kota Baru, dimana pengelolaan keuangan sekolah masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal perencanaan program dan pengelolaan laporan penggunaan anggaran.

Selain aspek manajemen keuangan, penelitian ini juga menemukan bahwa kondisi sarana dan prasarana pada keempat sekolah relatif memadai untuk mendukung proses pembelajaran, meskipun masih terdapat beberapa fasilitas yang terbatas. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah telah memiliki fasilitas dasar seperti ruang kelas, ruang guru, dan fasilitas administrasi sekolah. Namun demikian, beberapa fasilitas pendukung pembelajaran masih belum tersedia secara optimal. Sebagai contoh, hasil observasi menunjukkan bahwa SMP Negeri Fatumfaun dan SMA Negeri Noemuti memiliki kondisi sarana prasarana yang relatif lebih baik dibandingkan dengan sekolah lainnya, hal ini dilihat dari skor yang diperoleh mencapai 92% dan 89% (kategori sangat baik), terutama pada ketersediaan ruang belajar dan fasilitas pendukung kegiatan akademik. Sedangkan SMP Negeri Kota Baru dan SMPK St. Antonius Padua Sasi masih menghadapi keterbatasan pada beberapa fasilitas penunjang kegiatan sekolah. Salah satu guru menyampaikan bahwa keterbatasan fasilitas masih menjadi tantangan dalam mendukung pengembangan kegiatan siswa di sekolah.

“Beberapa kegiatan siswa sebenarnya membutuhkan fasilitas tambahan seperti ruang serbaguna atau sarana kesenian, tetapi fasilitas tersebut belum tersedia di sekolah” (Informan Guru).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa fasilitas pendukung pendidikan seperti ruang serbaguna, rumah ibadah, serta sarana kesenian masih sangat terbatas, bahkan belum tersedia di beberapa sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sarana dasar pembelajaran relatif tersedia, pengembangan fasilitas pendukung pendidikan di wilayah perbatasan masih perlu ditingkatkan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan



yang baik memiliki keterkaitan dengan kemampuan sekolah dalam menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana pendidikan. Sekolah yang memiliki sistem perencanaan keuangan yang lebih baik cenderung lebih mampu mengalokasikan sumber daya untuk mendukung kebutuhan sarana prasarana pembelajaran (Syam & Efiti, 2024).

Temuan peneliti menunjukkan seluruh sekolah menyusun perencanaan keuangan sekolah berupa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), dan menerapkan penggunaan keuangan sesuai dengan perencanaan, hal ini mendukung pengelolaan keuangan berdasarkan aturan dan mekanisme yang berlaku. RAPBS merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dengan menyusun RAPBS yang efektif, sekolah dapat mengalokasikan dana secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Imanika *et al.*, 2024). Hal ini didukung oleh pernyataan Hakim & Atoillah (2024) bahwa perencanaan anggaran yang teratur, sekolah dapat memastikan setiap program pengembangan sarana prasarana sesuai dengan yang direncanakan, sehingga mendukung akuntabilitas dan transparansi. Penelitian yang dilaporkan oleh Romansah *et al.* (2025) bahwa transparansi dalam mengelola keuangan lembaga pendidikan bisa memaksimalkan penggunaan dana guna memperbaiki kualitas sarana dan prasarana pembelajaran.

Selain pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pihak sekolah, peranan dari pemangku kepentingan seperti pemerintah, komite sekolah, dan masyarakat sangat diperlukan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sekolah tidak memperoleh bantuan dari masyarakat maupun dari sebagian pemerintah provinsi atau kota. Hal ini disebabkan oleh efisiensi anggaran pendidikan oleh pemerintah dan juga kondisi ekonomi masyarakat daerah perbatasan yang rendah. Hal ini didukung oleh temuan Nomleni & Kameo (2025) bahwa masyarakat yang hidup di kawasan perbatasan antar negara umumnya berada dalam kondisi sosial ekonomi yang terbatas dan identik dengan kemiskinan struktural. Meski demikian, hasil penelitian menunjukkan seluruh sekolah wilayah perbatasan sudah berusaha maksimal optimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Peran kepala sekolah, guru, pemerintah, komite, dan masyarakat sangat krusial dalam meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan daerah perbatasan. Inovasi kepemimpinan melampaui batas-batas sekolah itu sendiri, melibatkan masyarakat setempat, dan membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan eksternal, sehingga mengurangi beberapa tantangan yang ditimbulkan oleh keterbatasan sumber daya (Siswanto & Radiana, 2024).

Segala keterbatasan yang ada di wilayah perbatasan menuntut sekolah untuk memprioritaskan penggunaan anggaran pada program tertentu. Misalnya, penggunaan anggaran yang berkaitan dengan pembelajaran seperti penyediaan ruang kelas, fasilitas belajar, dan kegiatan pengembangan minat siswa. Namun demikian, kegiatan lain seperti alokasi dana untuk kelebihan jam mengajar, subsidi silang bagi siswa yang tidak mampu, serta dukungan terhadap kreativitas guru belum dilakukan. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Beronibla (2024) bahwa sekolah yang memprioritaskan kegiatan tertentu dalam perencanaan anggaran pendidikan, memiliki hubungan yang signifikan dengan efektivitas penggunaan anggaran dan kualitas kegiatan. Oleh sebab itu, disarankan untuk



menerapkan proses penganggaran yang transparan dan kolaboratif yang melibatkan pemangku kepentingan utama seperti orang tua, guru, dan mitra lainnya.

Pengelolaan keuangan sekolah memiliki peranan yang penting dalam pemeliharaan fasilitas yang tersedia serta pengadaan kebutuhan sarana prasarana yang baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di wilayah perbatasan pada umumnya telah memiliki beberapa fasilitas yang memadai seperti laboratorium, perpustakaan, ruangan guru, ruangan tata usaha, serta ruangan kepala sekolah. Ketersediaan ini tidak terlepas dari Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang menjadi dasar menentukan prioritas penggunaan dana pendidikan. Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa fasilitas pendukung pendidikan masih terbatas atau belum tersedia secara optimal, seperti ruang serbaguna, rumah ibadah, kantin sekolah, ruang OSIS, serta sarana kesenian. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan sekolah dalam menyediakan sarana prasarana sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen keuangan sekolah, khususnya dalam hal perencanaan anggaran, prioritas program, serta pemanfaatan sumber pendanaan yang tersedia.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukma & Nasution (2022) yang menyatakan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sangat bergantung pada perencanaan anggaran, pencatatan keuangan, serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel. Untuk itu, pengembangan pendidikan di wilayah perbatasan harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dalam hal perbaikan infrastruktur pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi multisektor (Komari *et al.*, 2025). Dukungan pemerintah dalam mengimplementasikan strategi yang tepat, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan pihak swasta di wilayah perbatasan NKRI-RDTL, diharapkan dapat meningkatkan akses, mutu, dan fasilitas pendidikan.

Menurut beberapa penelitian, manajemen keuangan memiliki hubungan dengan kualitas sarana dan prasarana. Pengelolaan keuangan yang efektif dapat meningkatkan kualitas lingkungan belajar siswa. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Pusvitasari & Sukur (2020) bahwa manajemen keuangan berimplikasi dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan melalui pelibatan *stakeholders*, baik internal maupun eksternal. Hal senada dikatakan oleh Sukma & Nasution (2022) bahwa pengelolaan keuangan lembaga untuk pengembangan lembaga dan infrastruktur pendidikan, serta mempertimbangkan pentingnya memelihara sarana dan prasarana yang ada dan yang akan datang.

Risdiyani *et al.* (2025) mengatakan bahwa keterlibatan komite sekolah dan guru dalam penyusunan RKAS memperkuat kualitas perencanaan dan efektivitas penggunaan anggaran serta fasilitas dan infrastruktur di sekolah. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan sekolah merupakan faktor penting dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di wilayah perbatasan NKRI-RDTL. Implementasi manajemen keuangan yang efektif memungkinkan sekolah untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah juga berperan penting dalam membangun kepercayaan.



SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen keuangan dalam pemenuhan sarana dan prasarana sekolah di wilayah perbatasan NKRI-RDTL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen keuangan sekolah memiliki variasi pada setiap sekolah, terutama pada aspek perencanaan anggaran, sumber pendanaan, serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan. SMA Negeri Noemuti menunjukkan praktik manajemen keuangan yang paling baik dengan skor 96% (kategori sangat baik). Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi sarana dan prasarana pada keempat sekolah secara umum cukup memadai untuk mendukung proses pembelajaran.

Data penelitian menunjukkan SMP Negeri Fatumfaun memperoleh skor paling tinggi yakni 92% (kategori sangat baik), meskipun beberapa fasilitas pendukung seperti ruang serbaguna, rumah ibadah, dan sarana kesenian masih terbatas. Sekolah yang memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik cenderung lebih mampu mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendidikan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah merupakan faktor penting dalam mendukung pemenuhan sarana prasarana pendidikan di wilayah perbatasan. Pengelolaan keuangan yang terencana, transparan, dan akuntabel memungkinkan sekolah mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

SARAN

Disarankan untuk pengembangan pendidikan di wilayah perbatasan harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dalam hal perbaikan infrastruktur pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi multisektor. Dukungan pemerintah dalam mengimplementasikan strategi yang tepat, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan pihak swasta di wilayah perbatasan NKRI-RDTL, diharapkan dapat meningkatkan akses, mutu, dan fasilitas pendidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih terutama ditujukan kepada rekan dosen yang turut membantu melakukan penelitian dan penulisan artikel. Terima kasih juga kepada mahasiswa program studi pendidikan biologi semester VIIC yang membantu dalam pengambilan data, serta *editor* dan *reviewer* Panthera : Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains dan Terapan atas saran dan kritik dalam penyempurnaan artikel penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriani, K., Handini, D. P., & Mulyono, M. (2025). Implementasi Manajemen Keuangan dan Manajemen Sarana dan Prasarana terhadap Mutu Pembelajaran pada Sekolah Dasar Islam Terpadu ROBBANI Singosari Kabupaten Malang. *Jurnal Bisnis Kreatif dan Inovatif*, 2(3), 141-152. <https://doi.org/10.61132/jubikin.v2i3.842>
- Aryanindita, G. P. (2026). Manajemen Keuangan Sekolah yang Transparan dan Akuntabel Yayasan Pendidikan Nusa Cendekia, Nusa Tenggara Timur.



- Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 5(1), 678-685.
<https://doi.org/10.59025/z5gp9413>
- Beronibla, M. R. M. B. (2024). Budget Allocation and Utilization in Local Schools in the Philippines. *Journal of Management and Technology*, 4(1), 63-79. <http://dx.doi.org/10.33021/ideas.v4i1.5606>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches (4th Ed.)*. California: SAGE Publications.
- GYM, M. A., & Muadin, A. (2025). Tantangan dan Solusi Pendidikan di Daerah Terpencil: Studi Kasus di Desa Jantur. *Jurnal Perubahan Ekonomi (JPE)*, 9(5), 73-81.
- Hakim, M. N., & Atoillah, N. (2024). Pengelolaan Sumber Keuangan dan Komite Sekolah sebagai Upaya Peningkatan Mutu SMP Negeri 1 Bangil. *At Tadbir : Islamic Education Management Journal*, 2(1), 1-12. <https://doi.org/10.54437/attadbir.v2i1.1508>
- Hasanah, R. (2021). Ketimpangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Isu HAM dan Kebijakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, 4(1), 1-9 <https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.97>
- Imanika, M. S., Faozi, R. N., Prasetya, G. A., & Mubarak, A. W. (2024). Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). *Jurnal Pelita Nusantara*, 2(2), 189-194. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v2i2.575>
- Jannah, W. (2025). Manajemen Pendidikan: Suatu Pengantar. *Sultra Education Journal*, 5(1), 36-45. <https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.840>
- Kennedy, P. S. J. (2022). Peningkatan Pemahaman Mengenai Masalah Pendidikan di Wilayah Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 122-127.
- Kholidah, N., Arifiyanto, M., Subowo, E., & Pambuko, Z. B. (2023). Factors Influencing the Interest in Using Sharia Digital Banking Applications in Indonesia. *Cakrawala : Jurnal Studi Islam*, 18(2), 87-102. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.10294>
- Komari, K., Aslan, A., & Rusiadi, R. (2025). Potret Tantangan dan Strategi Pengembangan Pendidikan di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri*, 5(4), 369-378. <https://doi.org/10.47353/bj.v5i4.616>
- Masbullah, M. (2023). Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Jurnal Agama Sosial dan Budaya*, 6(1), 93-101. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i1.2894>
- Nenotek, S. A., De Haan, A. E. M., Nifu, L. L., & Lindimara, E. (2023). Kesiapan Guru dalam Pembelajaran dengan Keterbatasan Teknologi. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(5), 1975-1984. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i5.5462>
- Nomleni, A. P. W., & Kameo, D. D. (2025). Fenomena Kemiskinan dan Perdagangan Pasar Gelap di Perbatasan Indonesia-Timor Leste. *Kritis*, 2025(1), 111-124.
- Pusvitasari, R., & Sukur, M. (2020). Manajemen Keuangan Sekolah dalam



- Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan (Studi Kasus di SD Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo) Rita. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 94-106. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i1.959>
- Risdiyani, H., Jumintono, J., & Saryanto, S. (2025). The Role of Financing Management and Infrastructure in Improving the Quality of Education in Elementary Schools. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 6(2), 665-674. <https://doi.org/10.55583/jkip.v6i2.1452>
- Romansah, S., Cahyani, D., & Ali, M. (2025). Manajemen Keuangan dalam Meningkatkan Sarana Prasarana Pembelajaran di MTs YPK Cijulang Tahun Pelajaran 2024/2025. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 342-354. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.39751>
- Siswanto, S., & Radiana, U. (2024). Navigating Change in Global Education Systems with Innovative Leadership Approaches. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 15(1), 27-40. <https://doi.org/10.21009/jmp.v15i1.49247>
- Sukma, A. H. B., & Nasution, A. M. (2022). Manajemen Keuangan Sekolah dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan di Bekasi. *Al-Fahim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 45-57. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v4i1.226>
- Syam, N. K., & Efitia, W. (2024). Implementation of School Financial Management Provides Educational Facilities and Infrastructure at the Junior High School (JHS) Level. In *Proceeding of International Students Conference of Economics and Business Excellence* (pp. 95-100). Tangerang Selatan, Indonesia: Universitas Terbuka.
- Tyas, A. C., Maheswari, N. P., & Aprilia, R. D. (2024). Pelayanan Pendidikan di Daerah Terpencil: Problematika Pendidikan di Indonesia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(1), 1020-1026. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i1.684>
- Wulakada, H. H. (2024). Disparitas Mutu Pendidikan di Wilayah Perbatasan (Refleksi Masyarakat Pinggiran Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur). In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Geografi* (pp. 119-139). Kupang, Indonesia: Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas Nusa Cendana.